

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT BERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN

**Oleh
M. Restu Akbar**

Adapun peristiwa yang ingin dilakukan analisis ialah perihal pihak yang hendak melakukan pembukaan lahan di luar wilayah Taman Nasional (wilayah inklaf) dengan melewati jalan transportasi masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Nasional, namun karena jalan tersebut bergelombang sehingga dilakukan perapihan dengan alat berat.

Bahwa tindakan berupa perapihan jalan pada kawasan Taman Nasional berakibat hukum sanksi pidana atas kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain Taman Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) jo. Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akibat hukum berupa sanksi pidana ini diperkuat dengan adanya Putusan Nomor: 491/Pid.B/LH/2018/PN Tjk.

Fungsi zona pemanfaatan dan zona lain ialah untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana diketahui bahwa: Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Karena korporasi yang dalam hal ini mengintruksikan perapihan jalan tidak melakukan pencegahan terhadap pegawai dan pekerjanya yang bekerja di lapangan guna menghindari terjadinya tindak pidana dan memastikan bahwa kegiatannya di lapangan telah patuh terhadap ketentuan hukum.

Kata Kunci : Taman Nasional, Fungsi Zonasi, Akibat Hukum, Pertanggungjawaban Korporasi.

ABSTRACT

DUE TO THE LEGAL CONSEQUENCES OF ROAD CLEANING WITH HEAVY EQUIPMENT ON COMMUNITY TRANSPORTATION ROADS IN THE NATIONAL PARK AREA TO CONDUCT LAND PLANNING

By
M. Restu Akbar

The event that needs to be analyzed is about the party who wants to clear land outside the National Park area (inclave area) by passing the public transportation road that is in the National Park area, but because the road is bumpy so it is done with heavy equipment.

Whereas actions in the form of road tidying in the National Park area result in criminal sanctions for activities that are not in accordance with the functions of the utilization zone and other zones of the National Park as regulated in Article 33 (3) jo. Article 44 (1) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The legal consequences in the form of criminal sanctions are reinforced by the Decision Number: 491/Pid.B/LH/2018/PN Tjk.

The function of utilization zones and other zones is for the development of nature tourism and recreation, environmental services, education, research and development that supports utilization, cultivation support activities.

According to Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations, criminal liability can be requested if it is known that: The corporation can obtain benefits or benefits from the crime or the crime is committed for the benefit of the corporation, the corporation allows the crime to occur, and corporations do not take the necessary steps to prevent, prevent larger impacts and ensure compliance with applicable legal provisions in order to avoid the occurrence of criminal acts.

Because the corporation, which in this case instructs the tidying of roads, does not prevent its employees and workers working in the field in order to avoid criminal acts and ensure that their activities in the field comply with legal provisions.

Keywords : **National Parks, Zoning Functions, Legal Consequences, Corporate Liability.**